

**DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL
TERHADAP DINAMIKA LINGKUNGAN SOSIAL
DESA PASIRGOMBONG**

**Nadya Kharima¹, Haya Nuramaliza², Miranda Zahra Syafrika Parameswari³, Satrio
Pandu Nugroho⁴, Agung Rivaldi⁵**

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta¹²³⁴⁵

Email: nadya.kharima@gmail.com¹, nuramalizahaya28@gmail.com²,
mirandaaazahra@gmail.com³, pandusantony20@gmail.com⁴, agung.rivaldy.ar@gmail.com⁵

Abstract

This study aims to describe and analyze the impact of Small-Scale Gold Mining (SSGM) activities on the social life of the community in Pasirgombang Village. The focus of the study includes patterns of socio-economic change in the community, lifestyles, and the potential for social conflict that may arise. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews with several key informants, namely active miners and community leaders. Data analysis is carried out qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that Small-Scale Gold Mining (SSGM) has become a more promising alternative livelihood compared to traditional agriculture and has changed the socio-economic orientation of the community. The presence of mining activities increases income, access to education, and quality of life. Despite socio-economic shifts, communal values and social solidarity remain strong. Conflicts over land ownership and profit sharing are generally minor and are resolved through traditional mediation. Small-Scale Gold Mining (SSGM) is a social phenomenon that reshapes community relationships and structures, with communities able to adapt and manage conflicts through local norms to ensure social stability.

Keywords: *Small-Scale Gold Mining, Social Transformation, Social Conflict, Community Adaptation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Pasirgombang. Fokus penelitian meliputi pola perubahan sosial ekonomi masyarakat, gaya hidup, dan potensi konflik sosial yang muncul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci berupa penambang aktif dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) telah menjadi alternatif mata pencaharian yang lebih menjanjikan dibandingkan pertanian tradisional dan mengubah orientasi sosial ekonomi masyarakat. Hadirnya aktivitas pertambangan meningkatkan pendapatan, akses pendidikan, dan kualitas hidup. Meskipun terjadi pergeseran aspek sosial ekonomi, nilai-nilai komunal dan solidaritas sosial tetap terjaga dengan baik. Adapun konflik terkait kepemilikan lahan dan bagi hasil umumnya bersifat minor dan diselesaikan melalui mediasi tradisional. Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) merupakan fenomena sosial yang membentuk kembali hubungan dan struktur komunitas, dengan masyarakat mampu beradaptasi dan mengelola konflik melalui norma lokal untuk memastikan stabilitas sosial.

Kata Kunci: *Pertambangan Emas Skala Kecil, Transformasi Sosial, Konflik Sosial, Adaptasi Komunitas.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, baik yang bersifat dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kekayaan alam tersebut memberikan potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan berdaulat di tingkat internasional. Salah satu sumber daya alam yang berperan penting sebagai sumber pendapatan negara adalah emas (Anggara, 2025). Pemanfaatan sumber daya emas ini dilakukan melalui berbagai skala kegiatan pertambangan, mulai dari pertambangan berskala besar hingga pertambangan skala kecil yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri. Pertambangan Emas Skala Kecil, yang kerap berlangsung secara informal masih banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia sebagai salah satu cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Safitri et al., 2024).

Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) merupakan aktivitas penambangan yang dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan keterbatasan modal dan teknologi. Kegiatan ini bersifat informal dan tersebar di berbagai wilayah pedesaan Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020), Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) berkontribusi sekitar 17–20% terhadap produksi emas dunia dan melibatkan sekitar 15 juta orang. Aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat lokal dengan menggunakan teknik tradisional, namun kegiatan ini menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aspek legalitas pertambangan (Andreastuti & Afrianti, 2025).

Pertambangan emas ilegal telah menjadi fenomena yang kompleks dan meluas di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat lokal hingga kelompok modal besar yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Aktivitas tersebut tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh dinamika sosial-budaya yang melekat pada komunitas lokal. Menurut Bimo Nugraha (2025) menyatakan bahwa masyarakat setempat kerap kali berhadapan dengan keterbatasan akses lapangan kerja formal maupun peluang ekonomi alternatif, sehingga memilih mengeksploitasi sumber daya alam sebagai mekanisme kelangsungan hidup. Meski demikian, pendekatan ini umumnya mengabaikan konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan serta tatanan sosial masyarakat.

Signifikansi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dalam konteks Indonesia semakin meningkat seiring dengan ekspansi aktivitas pertambangan yang sebagian besar beroperasi tanpa izin resmi dan menggunakan teknologi yang berbahaya. Indonesia tercatat sebagai negara dengan emisi merkuri terbesar ketiga di dunia dari sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), dengan pelepasan mencapai 195 ton merkuri per tahun, dimana 57,5% berasal dari sektor ini dan 60% diemisikan ke udara, 20% ke air, dan 20% ke tanah (Meutia et al., 2023; Puspita et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar operasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) bersifat ilegal dan menghindari regulasi pemerintah serta kewajiban perpajakan, sehingga menciptakan tantangan *governance* yang kompleks (Meutia et al., 2023). Permasalahan ini tidak hanya berdimensi lingkungan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan masyarakat, perubahan struktur sosial ekonomi, dan konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan.

Kabupaten Lebak, menjadi lokasi penting dalam kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan emas. Salah satu daerah yang paling terkenal dengan keberadaan pertambangan emas pertama milik Indonesia adalah daerah Cikotok, Kabupaten Lebak, Banten (Hardianti et al., 2020). Aktivitas pertambangan emas di kawasan ini telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, yang mulai beroperasi pada tahun 1939 (Treasury, 2025). Kemudian, setelah berakhirnya masa penjajahan, pada tahun 1968, tambang emas ini jatuh ke tangan Indonesia dan dikelola oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk (ANRI, 2015). Namun, PT ANTAM Tbk kemudian menghentikan operasional tambang tersebut secara resmi pada tahun 2008 (Treasury, 2025). Meski demikian, kegiatan pertambangan emas masih terus berlangsung hingga kini, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Lebak, salah satunya Desa Pasirgombong. Aktivitas ini lah yang dikenal sebagai Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombong tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan dinamika sosial. Dari sisi lingkungan, proses pengolahan emas dalam Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) melibatkan penggunaan bahan berbahaya, seperti merkuri (Hg) atau air raksa, sianida yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai *portas*, serta boraks atau *pijer* (Erwina et al.,

2018). Penggunaan bahan-bahan tersebut berkontribusi terhadap pencemaran air dan tanah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Bombana, Sulawesi Tenggara, di mana Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang ilegal menyebabkan degradasi lahan, pencemaran logam berat, dan menurunnya kualitas kesehatan pekerja tambang serta masyarakat sekitar (Basri et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hadirnya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) turut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja informal, tetapi kerap kali bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Penggunaan merkuri serta bahan kimia lain dalam proses ekstraksi emas menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem setempat dan kesehatan penduduk, sehingga dapat menghalangi capaian Sustainable Development Goals (SDG) yang relevan, khususnya SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) serta SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan yang baik) (Fermana et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional yang dikembangkan Talcott Parsons (1951). Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat bekerja layaknya sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai elemen saling bergantung, dan setiap bagian memiliki peran dalam menjaga keseimbangan serta keteraturan sosial. Teori ini membantu memahami bagaimana lembaga-lembaga sosial berinteraksi untuk mempertahankan stabilitas sosial di tengah perubahan ekonomi dan lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal, termasuk kegiatan ekonomi informal seperti Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang mulai mengubah pola hidup mereka.

Parsons mengemukakan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi dasar yang disebut skema AGIL: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau *Pattern Maintenance* (Parsons, 1951). Fungsi *Adaptation* menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sedangkan *Goal Attainment* menunjukkan arah kolektif dalam meraih kesejahteraan bersama. Fungsi *Integration* menjaga kohesi sosial agar masyarakat tetap solid, sementara fungsi *Latency* berperan dalam melestarikan nilai dan norma yang

menopang keseimbangan sistem sosial.

Dalam konteks Masyarakat Desa Pasirgombang, fungsi *Adaptation* tampak ketika masyarakat mulai menyesuaikan sistem ekonomi mereka dengan peluang baru di sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Fungsi *Goal Attainment* terlihat dari upaya kolektif masyarakat mencapai kesejahteraan melalui aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Sementara itu, fungsi *Integration* berperan penting dalam menjaga solidaritas sosial di tengah perubahan cepat akibat ekspansi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Fungsi *Latency* berhubungan dengan pelestarian nilai dan norma yang menjadi dasar perilaku sosial masyarakat Desa Pasirgombang.

Secara keseluruhan, Teori Struktural Fungsional Parsons memberikan kerangka yang kompleks untuk menjelaskan hubungan antara aktivitas ekonomi dan tatanan sosial. Dalam Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), keseimbangan sosial hanya dapat terwujud bila keempat fungsi AGIL: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau *Pattern Maintenance*, dari Teori Struktural Fungsional dapat berjalan secara kuat dan terstruktur. Jika salah satu fungsi melemah, seperti integrasi sosial yang terganggu atau nilai-nilai sosial yang mulai pudar, maka sistem sosial di Masyarakat Desa Pasirgombang beresiko mengalami ketegangan struktural yang bisa mengancam stabilitas sosial secara menyeluruh.

Selain pendekatan Struktural Fungsional, penelitian ini juga menggunakan Teori Konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx sebagai kerangka analisis pendukung dalam memahami dinamika sosial masyarakat Desa Pasirgombang. Adapun pemikiran Karl Marx lahir dari konteks Revolusi Industri yang membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perkembangan industri pada masa itu memunculkan ketimpangan sosial yang tajam, terutama antara pemilik modal dan kelompok pekerja. Marx melihat bahwa pemilik modal memiliki dominasi yang kuat dalam sistem ekonomi, sehingga mampu mengontrol dan menguasai kelompok sosial lainnya (Manarfa et al., 2024).

Teori Konflik memandang bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam keteraturan sosial, melainkan mengandung pertentangan kepentingan yang bersumber dari relasi kekuasaan, dominasi, dan otoritas antar kelompok sosial. Berdasarkan pandangan tersebut, Marx membagi masyarakat ke dalam dua kelas utama, yaitu kelas “Borjuis” sebagai pemilik modal dan kelas “Proletar” sebagai pekerja. Hubungan antara

kedua kelas ini ditandai oleh ketimpangan penguasaan sumber daya dan kepentingan yang saling bertentangan, sehingga menjadi sumber utama munculnya konflik sosial dalam masyarakat (Manarfa et al., 2024).

Dalam konteks aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), Teori Konflik Marx relevan untuk memahami relasi sosial antara pemilik lahan, penambang berpenghasilan besar, dan penambang berpenghasilan kecil, khususnya terkait pembagian hasil, pengelolaan lubang tambang, serta pengambilan keputusan ekonomi. Konflik sosial dalam kerangka pemikiran Marx tidak selalu berujung pada disintegrasi sosial, tetapi dapat dikelola melalui mekanisme sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Teori Konflik Marx dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap potensi ketimpangan dan konflik kepentingan yang menyertai aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), sekaligus melengkapi analisis struktural fungsional dalam menjelaskan dinamika sosial masyarakat Desa Pasirgombang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis dan ekonomi, sementara dimensi sosial seperti hubungan antar pelaku tambang, struktur kerja sama, dan kesejahteraan keluarga belum banyak dibahas. Misalnya, Ardikoesoema & Karuniasa (2025) meneliti transformasi mata pencaharian masyarakat di sekitar tambang emas ilegal di Kota Palu dan menemukan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan dan risiko kesehatan, tetapi juga membentuk pola sosial-ekonomi baru yang kompleks dalam komunitas tambang. Kemudian penelitian Sudiyarti (2021) berfokus pada menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, Dondo (2021) menyoroti dampak sosial pengelolaan tambang emas di Bolaang Mongondow, termasuk peningkatan ekonomi dan kerawanan konflik, namun belum secara mendalam menganalisis relasi sosial dan struktur kooperasi antar pelaku tambang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai bagaimana aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) membentuk dinamika sosial di masyarakat tambang rakyat seperti Desa Pasirgombang.

Penelitian Pollo (2023) menunjukkan peningkatan pendapatan secara perlahan

karena masyarakat beralih dari pertanian ke pertambangan, sehingga kebutuhan keluarga lebih terpenuhi. Dampak ekonomi ini terlihat dari fasilitas yang lebih baik seperti kendaraan dan usaha sampingan baru bagi pekerja tambang. Namun, penelitian yang menelaah secara spesifik bagaimana aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) memengaruhi kehidupan sosial, sistem kerja sama, serta kesejahteraan keluarga masih terbatas. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis pertanian menuju ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya telah mengubah pola interaksi sosial, sistem nilai, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif dalam komunitas. Transformasi ini menciptakan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya dan kohesi sosial komunitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) memengaruhi kehidupan sosial masyarakat di Desa Pasirgombang. Fokus penelitian diarahkan pada pola hubungan antara pemilik lahan dan penambang, sistem pembagian hasil tambang, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan potensi konflik sosial yang muncul. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman mendalam tentang transformasi dinamika sosial ekonomi masyarakat Desa Pasirgombang akibat Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Serta memperkaya kajian sosial tentang Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan mengintegrasikan teori yang ada dan mengisi kesenjangan literatur yang masih terbatas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial masyarakat yang terdampak aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Penelitian dilakukan di Desa Pasirgombang, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang merupakan wilayah dengan aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang masih aktif.

Pelaksanaan penelitian mencakup dua tahapan utama, yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam. Pada tahap awal, tim peneliti melakukan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta aktivitas pertambangan yang terjadi. Tahap selanjutnya adalah wawancara dengan 2 informan kunci, yang terdiri dari penambang aktif dan tokoh masyarakat, guna menggali informasi terkait sistem kerja sama, mekanisme pembagian hasil,

permasalahan sosial yang muncul di sekitar kegiatan tambang, serta pola interaksi masyarakat sebelum dan sesudah adanya Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema utama penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman ilmiah mengenai dinamika sosial akibat aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombang, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat menuju praktik pertambangan rakyat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan temuan transformasi yang terjadi dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pasirgombang sebagai dampak dari aktivitas pertambangan rakyat.

Perubahan Pola Perilaku dan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, diketahui bahwa sebelum kehadiran aktivitas pertambangan rakyat, struktur sosial ekonomi masyarakat Desa Pasirgombang sepenuhnya bersifat subsisten dan secara dominan berlandaskan sektor pertanian dan perkebunan.

“Jadi gini sekitar tahun 2000 ke bawah, mayoritas karena lahan kan juga masih banyak yang punya sendiri-sendiri gitu ya, jadi emang bertani masyarakatnya. Habis itu ada juga berkebun, kebun cengkeh, kebun kelapa, sama lainnya gitu. Nah karena berjalannya waktu tadi jadi banyak hambatan, kayak mulai banyak babi dan kera yang udah Bapak sampaikan kan waktu di masjid itu sebetulnya. Ditambah semenjak ada tambang gitu ya, hasilnya mah lumayan dibanding tani apa berkebun jadi banyak yang pindah lah istilahnya (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa realita mayoritas penduduk secara turun-temurun berprofesi sebagai petani dan pekebun, mengandalkan hasil dari lahan milik sendiri dengan komoditas utama berupa cengkeh, kelapa, dan berbagai hasil kebun lainnya. Kegiatan pertanian mereka bersifat tradisional dan utamanya diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial yang signifikan.

“Kalau secara jujur bapak ya, sesudah ada tambang buat mencari dana aja itu lebih mudah sekarang. Kalau dulu ditarik Rp5.000 misalnya ada kegiatan sumbangan bantuan warga gitu ya, susah Nak. Sekarang mah bisa 50.000, 100.000 gitu. Makanya di Kampung Garung Lebak aja, kalau mau apa ya istilahnya, Rajaban lah, apa Maulid-

an gitu, per RT itu ditentukan uang 1 juta gampang gitu. Terus mah sekarang anak-anaknya jadi pada bisa sekolah tinggi gitu, dibanding waktu masih pada jadi tani apa ke kebun (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Hal ini memperlihatkan kondisi ekonomi masyarakat pada masa tersebut tergolong sederhana dan terbatas, ditandai dengan tingkat penghasilan yang sangat minim dan kesulitan yang nyata dalam mengakses uang tunai. Keterbatasan finansial ini memiliki dampak sosial yang serius, terutama pada aspek pendidikan, di mana akses menuju pendidikan tinggi sangat sulit dijangkau, sehingga banyak anak hanya menempuh pendidikan dasar sebelum terlibat langsung dalam pekerjaan sektor pertanian.

Masuknya kegiatan Pertambangan Rakyat kemudian memicu transformasi sosial yang jelas, khususnya ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi pola individualisme ekonomi, yang terfokus pada kepentingan finansial dan kesejahteraan keluarga. Perubahan ini tercermin dalam praktik kebersamaan, seperti pembangunan rumah yang beralih dari praktik gotong royong tanpa upah menjadi penggunaan tenaga kerja berbayar (kuli bangunan) sebagai konsekuensi dari peningkatan kemampuan ekonomi warga. Seperti yang dikatakan oleh informan sebagai berikut.

“Karena kan sekarang mah istilahnya gampang gitu ya buat dapet uang, jadinya buat sekolahin anak sampai sarjana lah setidaknya bisa. Rumah-rumahnya warga di sini juga kan jadi pada berubah bagus-bagus, keramikan gitu ya dibanding dulu mah yang waktu membangun dari warga sekitarnya sendiri gitu, karena belum pada bisa bayar orang (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Meskipun terjadi pergeseran fokus ekonomi, nilai-nilai solidaritas sosial dan komunal tidak hilang, melainkan mengalami penyesuaian fungsional.

“Perubahan tidaknya sih tidak tidak berubah ya, cuma menyesuaikan aja lebih tepatnya. Yang dulunya mah gotong royong kayak kerja bakti, mengaji, rapat desa bisa kapan aja gitu, tapi sekarang karena penambang kan libur cuma hari Minggu ya jadi kegiatan warganya dibuat ke Minggu (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, musyawarah desa, dan pengajian tetap dilaksanakan secara rutin, sering kali disesuaikan waktunya pada hari libur penambang (Minggu), menegaskan bahwa adat dan budaya kampung masih berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Selain adaptasi nilai-nilai komunal, masyarakat cenderung menjadi lebih terbuka dan aktif saling membantu dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas, terutama saat terjadi musibah. Fenomena ini

menunjukkan bahwa meskipun terjadi transformasi sosial ekonomi akibat pertambangan, rakyat di Desa Pasirgombang mencerminkan adaptasi fungsional sistem sosial dengan adanya peningkatan ekonomi yang diimbangi penyesuaian nilai komunal untuk mempertahankan keseimbangan masyarakat.

Dampak Pertambangan terhadap Gaya Hidup

Kegiatan pertambangan di Desa Pasirgombang telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari besarnya penghasilan yang diperoleh, tetapi juga dari cara masyarakat mengelola pendapatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penuturan informan, peningkatan pendapatan dari hasil tambang dimanfaatkan secara beragam oleh masyarakat Desa Pasirgombang, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

“Sebagian warga memilih menggunakan hasil tambang untuk membangun rumah atau membeli sawah dan kebun, karena mereka sadar pekerjaan tambang tidak selalu ada dan hasilnya tidak pasti (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Pernyataan ini menguatkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memandang hasil tambang sebagai pendapatan konsumtif semata, melainkan sebagai sumber daya ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati. Kesadaran akan risiko dan ketidakpastian sektor pertambangan mendorong sebagian warga untuk mengarahkan penghasilannya pada investasi jangka panjang yang dinilai lebih aman bagi keberlangsungan ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, dinamika ekonomi masyarakat tidak berlangsung secara seragam. Informan juga mengakui adanya perbedaan perilaku ekonomi di kalangan warga penambang, terutama dalam pola penggunaan pendapatan. Variasi ini mencerminkan perbedaan cara pandang, pengalaman, serta kemampuan masing-masing individu dalam mengelola hasil tambang.

“Semang ada juga warga yang cenderung menghabiskan uangnya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi jumlahnya tidak banyak dan tergantung pada cara berpikir masing-masing orang (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Hal ini sejalan dengan temuan analisis yang menyimpulkan bahwa perilaku konsumtif bukan merupakan dampak dominan dari aktivitas pertambangan, melainkan dipengaruhi oleh karakter individu dan kemampuan mengelola pendapatan. Pandangan

serupa disampaikan oleh informan, yang menekankan bahwa perbedaan dalam pengelolaan hasil tambang merupakan hal yang wajar.

“Ada warga yang menabung dan berpikir panjang, ada juga yang cepat habis penghasilannya, tetapi itu tidak menjadi persoalan karena masyarakat sudah memahami kondisi masing-masing (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Pernyataan ini mempertegas bahwa perubahan gaya hidup akibat pertambangan tidak bersifat seragam dan tidak secara otomatis mengarah pada pola hidup konsumtif. Masyarakat Desa Pasirgombang memiliki mekanisme sosial yang memungkinkan mereka menerima perbedaan tersebut tanpa menimbulkan ketegangan sosial.

Dari sisi status sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akibat aktivitas pertambangan tidak diikuti oleh perubahan posisi sosial yang hierarkis di tengah masyarakat Desa Pasirgombang. Penambang tidak dipersepsikan sebagai kelompok yang lebih tinggi dibandingkan warga non-penambang.

“Walaupun penghasilan penambang lebih besar, mereka tetap hidup sederhana dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari warga lain (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Informan juga menambahkan bahwa hubungan antarwarga tetap terjaga karena adanya kebiasaan saling membantu. Temuan ini konsisten dengan hasil analisis yang menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak mengubah struktur sosial masyarakat desa secara hierarkis.

Informan lain juga memperkuat pandangan tersebut dengan menjelaskan bahwa warga yang memperoleh keuntungan besar dari pertambangan justru cenderung berbagi.

“Biasanya kalau ada yang dapat hasil besar, mereka mengadakan syukuran atau menyumbang untuk kepentingan bersama, sehingga warga lain ikut merasakan manfaatnya (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Praktik ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah munculnya kecemburuan sosial dan memperkuat hubungan sosial antar Masyarakat Desa Pasirgombang.

Terkait perbedaan antara keluarga penambang dan non-penambang, informan menilai bahwa keluarga penambang memang relatif lebih sejahtera dari sisi ekonomi, namun kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik sosial. Perbedaan penghasilan dipahami sebagai konsekuensi dari jenis pekerjaan yang berbeda dan diterima secara realistis oleh masyarakat.

“Keluarga penambang penghasilannya lebih besar, tetapi tidak stabil, sedangkan petani penghasilannya kecil tapi lebih tenang, dan keduanya sama-sama saling membantu (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Pernyataan ini mendukung analisis bahwa perbedaan ekonomi dipahami sebagai bagian dari realitas kehidupan desa dan tidak menjadi sumber ketegangan sosial.

Informan juga menegaskan bahwa hubungan sosial antarwarga tetap harmonis meskipun terdapat perbedaan gaya hidup.

“Penambang mungkin lebih sering membeli kebutuhan, sementara petani menanam sendiri, tetapi itu tidak menimbulkan masalah karena justru saling melengkapi (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Temuan ini memperkuat bahwa aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) turut meningkatkan perputaran ekonomi desa tanpa merusak kohesi sosial.



Gambar 1. Syukuran Warga

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan kedua informan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pasirgombang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi akibat aktivitas pertambangan tanpa mengganggu keseimbangan sosial. Pemanfaatan hasil tambang tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang, menggambarkan kemampuan adaptif masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dalam kerangka Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons, hal ini mencerminkan berfungsinya aspek *adaptation* dan *goal attainment*, di mana masyarakat mampu mengelola sumber daya ekonomi sekaligus menetapkan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Pernyataan kedua informan mengenai kebiasaan menabung, berbagi hasil, dan mendukung kegiatan sosial menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan.

Selain itu, hubungan sosial antara penambang dan non-penambang tetap terjaga melalui gotong royong, partisipasi kegiatan desa, serta tradisi syukuran dan sumbangan sosial. Praktik ini memperlihatkan berfungsinya aspek *integration* yang menjaga keharmonisan sosial serta mencegah konflik akibat perbedaan pendapatan. Nilai-nilai seperti solidaritas, kesederhanaan, dan saling menghormati terus diwariskan melalui interaksi sosial, mencerminkan fungsi *latency* yang menjaga kestabilan sosial masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombong dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang berjalan cukup stabil. Keempat unsur AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, dan latency*) bekerja bersama dalam menjaga keseimbangan sosial, sehingga perubahan ekonomi tidak menimbulkan disorganisasi dalam kehidupan Masyarakat Desa Pasirgombong.

Konflik Lahan dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda sering kali memunculkan persoalan baru terkait kepemilikan lahan dan pembagian hasil. Konflik merupakan suatu fenomena sosial yang dapat muncul setiap waktu dalam kehidupan masyarakat. Konflik biasanya timbul disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang berupaya untuk menguasai sumber daya dan posisi yang bersifat terbatas atau langka (Fauzi & Nulhaqim, 2024). Kondisi tersebut juga ditemukan dalam praktik Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombong, di mana interaksi antara penambang dan pemilik lahan berpotensi menimbulkan perselisihan.

Fenomena tersebut sejalan dengan kondisi di Desa Pasirgombong. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, konflik antara penambang dan pemilik lahan memang terjadi, namun umumnya bersifat ringan dan dapat diselesaikan secara damai. Sumber utama perselisihan biasanya berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan pembagian hasil, perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan lubang tambang, atau adanya bentrok antara batas wilayah lubang penambang satu dengan yang lainnya.

“Konflik antara pemilik lahan dan penambang terkadang ada, biasanya terkait kesepakatan antara kedua belah pihak ada yang tidak terpenuhi, misal sudah beberapa hari penambang tidak membagi hasil dengan pemilik lahan itu biasanya terjadi konflik, tapi hanya konflik ringan saja (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul lebih bersifat situasional dan berkaitan dengan dinamika kerja sama antara penambang dan pemilik

lahan daripada konflik yang menyebabkan pertentangan terbuka yang berlangsung lama.

Selain yang bersifat ringan, terdapat pula konflik yang tergolong serius. Menurut informan yang merupakan seorang penambang aktif, konflik antar sesama penambang memang hampir tidak pernah terjadi, hanya sebagian kecil yang pernah berkonflik. Namun, ada kalanya konflik tersebut muncul disebabkan oleh oknum penambang tertentu. Bentuk konflik tersebut biasanya terkait dengan adanya laporan kegiatan tambang ilegal oleh penambang yang berpenghasilan kecil yang merasa tersaingi dengan penambang yang sudah berpenghasilan besar. Laporan tersebut ditujukan kepada pihak berwenang, sebagai bentuk kecemburuan sosial karena adanya kesenjangan penghasilan antarpemambang. Dalam kasus seperti ini, penambang biasanya menyelesaikan masalahnya dengan membayar tebusan agar permasalahan selesai.

“Konflik antarpemambang sih hampir gak ada ya, kalo diibaratkan 100 penambang, paling hanya ada 1 yang berkonflik. Dan konflik itu pun bukan dengan sesama penambang ya, tapi dengan pihak luar (oknum). Jadi ada penambang yang udah berpenghasilan besar dan ada penambang yang masih berpenghasilan kecil (oknum). Si oknum suka ada tindakan melaporkan ke kepolisian kalau penambang lain melakukan pertambangan ilegal. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya penambang yang dilaporkan ini akan memberi uang tebusan dan akhirnya dibebaskan (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Meskipun demikian, penyelesaian konflik di masyarakat Desa Pasirgombang umumnya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, dengan menghadirkan ketua lahan tambang dan kedua pihak yang bergesekan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara langsung, biasanya akan melibatkan perangkat desa seperti RT, RW, atau kepala desa. Pola penyelesaian masalah ini mencerminkan masih kuatnya nilai-nilai sosial, solidaritas, serta mekanisme tradisional masyarakat dalam menjaga keharmonisan hubungan antara penambang dan pemilik lahan.

“Penyelesaian konfliknya itu melalui mediasi oleh ketua-ketua pertambangan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bergesekan. Akan dicari kesepakatan antara batas lobangnya dan pembagian hasilnya berapa persen, atau biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, bisa bersama RT dan RW, namun ketika masalahnya sulit diselesaikan, bisa dibawa hingga ke kepala desa (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Secara keseluruhan, konflik lahan tidak selalu berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di Desa Pasirgombang. Seperti pada konflik yang tergolong ringan, setiap permasalahan yang muncul langsung dimediasi oleh ketua lahan tambang atau perangkat desa dan diselesaikan melalui kesepakatan bersama, sehingga konflik tidak sampai meluas dan tidak menimbulkan gangguan sosial di lingkungan sekitar.

“Intinya, antara kedua belah pihak yang saling bergesekan itu akan dimediasi oleh ketua, dibuat kesepakatannya bagaimana, dan diselesaikan saat itu juga. Jadi konfliknya tidak sampai timbul keluar, apalagi berdampak ke masyarakat (Wawancara Bpk S, 10 Agustus 2025)”.

Namun, sebagaimana pada konflik yang tergolong serius, konflik yang melibatkan oknum penambang tersebut terkadang menimbulkan rasa takut dan keresahan di kalangan masyarakat yang menambang, karena adanya kekhawatiran akan campur tangan pihak berwenang.

“Dampaknya untuk masyarakat sih ya, kami jadi merasa takut dan resah ya kalau sudah berurusan dengan oknum itu, apalagi sudah sampai dibawa ke ranah hukum (Wawancara Bpk J, 12 Agustus 2025)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan kunci, Teori Konflik Karl Marx dapat digunakan untuk menjelaskan temuan konflik lahan dalam aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombang. Dalam pandangan Marx, konflik muncul sebagai akibat dari perebutan kepentingan ekonomi dan perbedaan posisi dalam struktur produksi, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ketimpangan pembagian hasil secara langsung. Dalam konteks kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombang, hubungan antara penambang dan pemilik lahan pada dasarnya telah diatur melalui kesepakatan bersama terkait pembagian hasil dan waktu pengelolaan lahan, sehingga tidak ditemukan kesenjangan pembagian keuntungan yang signifikan. Namun konflik tetap dapat muncul ketika terjadi pelanggaran terkait perjanjian penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Relasi ini mencerminkan pertentangan kepentingan ekonomi sebagaimana digambarkan Marx dalam hubungan antara kelompok dominan dan subordinat.

Selain itu, konflik yang juga menonjol justru terjadi antarpemambang, khususnya antara penambang dengan penghasilan besar dan penambang dengan penghasilan kecil. Perbedaan tingkat pendapatan ini memunculkan kecemburuan sosial yang menjadi pemicu konflik, meskipun para penambang berada dalam struktur kerja dan aturan yang

sama. Dalam kerangka teori Karl Marx, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk pertarungan kepentingan ekonomi antarindividu dalam satu kelas sosial yang sama, di mana akses terhadap hasil produksi yang lebih besar menciptakan perasaan tidak adil bagi pihak yang berada pada posisi ekonomi lebih lemah. Kecemburuan sosial tersebut kemudian diekspresikan melalui berbagai bentuk tindakan, termasuk perselisihan personal maupun pelaporan aktivitas tambang ilegal sebagai upaya mempertahankan atau meningkatkan posisi ekonomi.

Meski konflik muncul dalam aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombang, konflik tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang besar atau berlangsung lama. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kondisi ekonomi sebagai pemicu konflik masih dapat dikelola melalui mekanisme sosial yang ada di masyarakat. Musyawarah, mediasi oleh ketua lahan tambang, serta peran perangkat desa menjadi cara utama dalam meredam konflik dan menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Dengan demikian, konflik tidak selalu berujung pada perpecahan sosial, tetapi dapat berjalan seiring dengan upaya bersama masyarakat dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial di sekitar aktivitas pertambangan.



Gambar 2. Wawancara dengan Informan

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Pasirgombang, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, serta seluruh informan kunci yang terdiri dari penambang dan tokoh masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan berharga terkait dinamika sosial akibat aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Semoga hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Desa Pasirgombang. Aktivitas pertambangan menjadi alternatif mata pencaharian yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan sektor pertanian tradisional, sehingga mendorong terjadinya pergeseran pola kerja dan orientasi ekonomi masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan sumber penghidupan sebelumnya.

Dari aspek sosial ekonomi, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan serta kualitas tempat tinggal. Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut bersifat fluktuatif dan tidak merata, mengingat ketidakpastian hasil tambang. Meskipun demikian, masyarakat Desa Pasirgombang menunjukkan kesadaran yang cukup baik dalam mengelola hasil tambang, di mana sebagian pendapatan dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian lahan pertanian dan kebun. Hal ini mencerminkan orientasi rasional masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian sektor pertambangan.

Di sisi lain, aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) juga memunculkan potensi konflik sosial, terutama terkait kepemilikan lahan, pembagian hasil, dan kecemburuan ekonomi antarpemambang. Konflik yang terjadi umumnya bersifat terbatas dan dapat dikelola melalui mekanisme musyawarah, mediasi ketua lahan, serta peran perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam konteks Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) tidak berkembang menjadi konflik sosial terbuka, melainkan menjadi bagian dari dinamika sosial yang dapat dikendalikan melalui norma dan institusi lokal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Desa Pasirgombang telah menjadi bagian dari sistem sosial yang berjalan secara adaptif. Dalam kerangka Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons, keempat fungsi AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, dan latency*) masih berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Sementara itu, Teori Konflik Karl Marx membantu menjelaskan adanya

ketegangan dan persaingan kepentingan ekonomi yang menyertai aktivitas pertambangan. Dengan demikian, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi sebagai fenomena sosial yang membentuk ulang relasi, nilai, dan struktur kehidupan masyarakat Desa Pasirgombong.

Saran

Temuan dari wawancara kami menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memanfaatkan pendapatan tambang untuk kebutuhan produktif, seperti investasi dan pendidikan. Langkah ini perlu diperkuat melalui pendampingan dan program pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan pendapatan menjadi lebih berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan membuka peluang alternatif mata pencaharian di masa depan.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melibatkan informan yang lebih beragam, termasuk aparat desa, keluarga penambang, tenaga kesehatan, dan pihak pemerintah daerah, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Selain itu, penelitian jangka panjang dan kajian komparatif antara desa tambang perlu dilakukan untuk memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pengelolaan konflik masyarakat pertambangan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreastuti, D., & Afrianti, P. (2025). Local Needs-Based Responsive Policy for Small-Scale Gold Mining Control: A Case Study in Gunung Mas. *Serunai: Scientific Journal*, 05(01), 30–43.
- Anggara, K. (2025). Tambang Emas Ilegal Banyumas dalam konteks Ketahanan Nasional dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- ANRI. (2015). *Inventaris Arsip PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (1931) 1942-2008: Arsip Tekstual* (Issue 1931).
- Ardikoesoema, N., & Karuniasa, M. (2025). Assessing the Transformation of Livelihoods in Illegal Gold Mining Communities. *Journal of Environmental Science and Sustainable Development*, 8(1), 304–332.
<https://doi.org/10.7454/jessd.v8i1.1353>

- Basri, Achmad, A., Jufri, Sulaiman, & Alkamalia, W. (2023). Karakteristik dan Persepsi Ekonomi Pekerja Tambang yang Terlibat pada Pertambangan Emas Skala Kecil di Area Bombana. *Promotif Preventif*, 6(2), 265–273.
- Bimo Nugraha, M. R. (2025). Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5302–5318. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3055>
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mogondow. *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penaggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado*, VII(102), 43–52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33302/31497>
- Erwina, W., Kurniasih, N., & Perdana, F. (2018). Upaya menumbuhkan literasi informasi Kesehatan pada anak-anak di sekitar daerah penambangan emas tradisional melalui perintisan taman bacaan masyarakat (TBM). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). Masalah Konflik Pertambangan DI Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6, 36.
- Fermana, R., Akhdiyat, H. R., Hadi, I., & Aryanti, E. (2024). Dampak Penambangan Emas Skala Kecil terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pesisir dan Sosial-Ekonomi di Desa Pelangan, Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 3(2), 298–309.
- Hardianti, A., Prayogo, T., Hudiya, N., Lusiani, S., & Andini, A. P. (2020). Inventarisasi Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Skala Kecil Di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. *Jurnal Envirotek*, 12(1), 56–61. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v12i1.23>
- KLHK. (2020). *Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK): Tantangan Dalam Akses Pembiayaan*. Menlhk.Go.Id. <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=pertambangan-emas-skala-kecil-pesk-tantangan-dalam-akses-pembiayaan>
- Manarfa, L. O. M. R. A. U., Aris, M., Prayogi, A., Amin, H., Tenri, A., Hara, K. M.,

- Sari, K., Tesaannisa, Munafi, L. O. A., & Mandati, W. O. R. (2024). Teori Sosiologi. In *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021* (Vol. 1, Issue 69). <http://dinkes.sulselprov.go.id/page/download>
- Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment Degradation, Health Threats, and Legality at the Artisanal Small-Scale Gold Mining Sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18).
- Parsons, T. (1951). *The Social System* (Vol. 32, Issue 3).
- Pollo, M. F., Dar, S. I. S., & Santoso, I. R. (2023). Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Tradisional terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Tanoyan Utara Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 1–5.
- Puspita, A. N. G., Sudiyanto, Y., Haryanto, I., & Madra, Q. N. (2023). Socio-economic baseline, economic feasibility study and processing activities ASGM in Obi Island, South Halmahera District, North Maluku Province, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 10(4), 4611–4627. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2023.104.4611>
- Safitri, O., Safitri, M., Alvaro, R. R., Fitri, T. T., & Ningrum, T. A. (2024). Manajemen Risiko pada Sektor Pertambangan Informal : Analisis Longsor Tambang Emas Ilegal di Nagari Sungai Abu , Hiliran Gumanti , Solok pada Tahun 2024. *Jurnal Media Akademik*, 3(12).
- Sudiyarti, N., Fitriani, Y., & Jusparnawati, J. (2021). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 152–160. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>
- Treasury. (2025). *Perjalanan Panjang Tambang Cikotok, Tambang Emas Pertama di Indonesia*. Treasury.Id. <https://www.treasury.id/perjalanan-panjang-tambang-cikotok-tambang-emas-pertama-di-indonesia>